

LAMPIRAN

Lampiran 1 Butir-Butir Pertanyaan Wawancara

BUTIR-BUTIR PERTANYAAN WAWANCANA**TAHAP 1**

NO	PERTANYAAN
	<p>Narasumber : Bapak Aris Purwanto Kabid Akuntansi sekaligus merangkap sebagai PRT Kabid Perbendaharaan di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo</p>
1	<p>Bagaimana Gambaran Umum atau Profil yang bapak ketahui mulai dari awal berdirinya kantor tersebut dan bisa menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Mengingat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan SOPD baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai PP 18 Tahun 2016, hasil penggabungan SOPD Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, Dinas Pengelolaan keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan, maka kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2018 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD lain.</p> <p>Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Probolinggo, maka Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014-2016 yang lebih menantang, berorientasi pada</p>

kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BK harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo .

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2013 Kabupaten Probolinggo mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.

2	<p>Bagaimana Visi dan misi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Semua Visi dan Misi Badan mengacu pada Visi Misi dan Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.</p>
3	<p>Seperti apa susunan Struktur kelembagaan atau Struktur Organisasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo?</p> <p>Jawaban :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kepala Badan.b. Sekretariat, membawahi:<ul style="list-style-type: none">1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.2. Kelompok Jabatan Fungsional.c. Bidang Anggaran, membawahi:<ul style="list-style-type: none">1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.2. Sub Bidang Kebijakan Anggaran.3. Kelompok Jabatan Fungsional.d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:<ul style="list-style-type: none">1. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah.2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.3. Kelompok Jabatan Fungsional.e. Bidang Akuntansi, membawahi:<ul style="list-style-type: none">1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan.

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja. 3. Kelompok Jabatan Fungsional. f. Bidang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah. 2. Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan. 3. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Bidang Pendapatan, membawahi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sub Bidang Penetapan. 2. Sub Bidang Penagihan. 3. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Kelompok Jabatan Fungsional. i. UPT.
4	<p>Apa saja tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kepala Badan</p>

1. Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah, Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah, Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : Pengekoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan,

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana, Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi, Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang Anggaran

1. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi : Penyusunan perencanaan teknis bidang Anggaran, Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap

perumusan kebijakan Anggaran, Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Anggaran, Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya, Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan SKPKD, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Anggaran, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Perbendaharaan

1. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : Perumusan dan penyusunan kegiatan perbendaharaan, Pengendalian atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pengendalian pengelolaan Gaji ASN, Pembinaan pengelolaan keuangan daerah, Pembinaan pengelolaan kas daerah, Pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi atau lembaga terkait perbendaharaan, Perumusan dan penyusunan kegiatan

penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, Perumusan dan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan implementasi SIPD, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Akuntansi

1. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : Penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi, Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi, Pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan system akuntansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah, Pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan BLUD, dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan, Pengoordinasian dan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Daerah, Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah, Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Penyusunan Sistem Prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Pengoordinasian dan penyusunan statistic keuangan pemerintah daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang akuntansi, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan penyusunan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, Perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, Perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah, Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah, Pelaksanaan penilaian barang milik daerah, Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, Pelaksanaan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik

Daerah, Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Pendapatan

1. Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : Perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah, Pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah, Pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah, Pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah, Pelaksanaan pendataan dan penetapan pendapatan daerah, Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penagihan piutang daerah, Pelaksanaan, pengawasan dan penindakan penerimaan/pendapatan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1) huruf i

	<p>ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
5	<p>Bagaimana prosedur pada pengelolaan keuangan daerah dalam rangka merancang APBD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Perinsipnya dalam penyusunan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah itu ada 3 hal yang harus kita pahami yang pertama proses penganggaran, perencanaan kemudian yang kedua proses penatausahaan yang ketiga proses pelaporan keuangan yang didalamnya kaitannya dengan laporan keuangan yaitu di akuntansi. Terkait proses pengelolaan keuangan daerah itu bahwasanya kita selaku koordinator di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo (BPPKAD) disini di pemerintah Kabupaten Probolinggo ada yang namanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang di ketuai oleh Bapak Sekretaris Daerah kemudian asisten 1, 2, 3 kemudian kepala BPPKAD kemudian bapak inspektur kemudian kepala BAPPEDA kemudian ada kami para KABID di BPPKAD mulai dari Kabid Anggaran kemudian ada Kabid Perbendaharaan, Kabid Akuntansi, Kabid Asset, Kabid Pendapatan sama Sekretaris disitu ada TAPD mengakomodir usulan-usulan anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikita ada kurang lebih 55 OPD, 55 OPD itu didalamnya sudah ada 24 kecamatan 5 kelurahan sisanya itu dimulai dari Dinas, Dadan, Bagian didalamnya total ada 55 OPD. Jadi 55 OPD itu mengusulkan kegiatan program dan kegiatan masing-masing pada OPDnya masing-masing kemudian diusulkan ke TAPD, setelah usulan itu masuk baru kita lakukan verifikasi. Usulan-usulan itu yang dinamakan Rencana Kegiatan</p>

Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari usulan-usulan RKA masing-masing OPD itu kemudian oleh TAPD dilakukan verifikasi apakah yang sudah diusulkan oleh OPD sudah sesuai atau tidak? Apakah sesuai kebutuhan atau tidak? Apakah sesuai dengan regulasi atau aturan tidak? Itu kita rumuskan kita verifikasi, dari proses RKA itu dinamakan proses perencanaan penganggaran dari usulan-usulan itu apakah itu sudah sesuai dengan Standar Harga Satuan (SHS) karena didalam pemerintah kabupaten Probolinggo itu di BPPKAD itu menyusun yaitu Standart Harga Satuan, Standart Harga Satuan itu isinya kaitannya dengan misalnya pemberian honor pemberian itu ada batasannya, kemudian yang kedua kaitannya dengan perjalanan dinas ini berkaitan dengan berapa nominalnya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah, luar daerah, luar provinsi itu ada standarnya lalu kemudian penyusunan kaitannya dengan pemberian honor kemudian honor pengadaan barang dan jasa kemudian honor GTT, honor PTT yang non PNS semua itu sudah tertuang dalam peraturan bupati yaitu SHS. Yang harus dipedomani oleh OPD yaitu SHS pada saat menentukan harga satuan di penyusunan RKA, setelah itu masuk semua ada batas waktunya dilakukan verifikasi setelah proses itu selesai baru kemudian dimunculkan DPA yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran itu pada saat penetapan peraturan daerah APBD untuk tahun berikutnya setelah itu di Doc DPA-nya kemudian OPD melakukan proses pelaksanaan kegiatan. Tahap 1 ini perencanaan penganggaran telah selesai kemudian kita masuk diproses penatausahaan, proses itu berkaitan dengan proses peng-SPJ an proses peng-SPJ an ini ada mekanismenya ada yang melalui mekanisme GU ada yang menggunakan mekanisme LS itu tertuang dalam permendagri 77 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah jadi pedoman kaitannya dengan proses penata usahaan yaitu di PERMENDAGRI 77 tahun 2021 itu sudah mulai pengajuan SPJ baik GU baik LS disitu didalamnya ada pengajuan gaji pengajuan kegiatan, kegiatan itu macam-macam ada kegiatan yang kaitannya

dengan sosialisasi kemudian ada bimbingan teknis ada perjalanan dinas kemudian ada pengajuan dokumen kontrak proses pengajuan barang dan jasa disitu didalamnya ada mulai dari proses pengadaan barang, pengadaan kontruksi didalamnya ada gedung bangunan kemudian dokumen pengadaan barang misalnya pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan dan sedang kemudian pembelian kendaraan semua itu prosesnya melalui proses penatausahaan kalau dokumen kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa itu semua sudah ada aplikasinya yang dinamakan E-Katalog jadi semua proses ada disitu mulai dari proses pengadaan makan dan minum kaitannya dengan bekerjasama dengan pihak catering, proses-proses penatausahaan itu / peng-SPJ an dari masing-masing OPD ini mengusulkan yaitu dalam bentuk dokumen SPB dan SPM yaitu surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar diajukan ke BPPKAD setelah itu baru dari BPPKAD ini kita buat dokumen SP2D yaitu Surat Perintah Pencairan Dana, surat itu kita terbitkan lalu kemudian dilakukan proses transfer uang dari RKUD Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh pihak BANK JATIM kemudian ditransfer ke masing-masing usulan OPD itu terkait proses pembayaran. Proses penatausahaan ini sudah selesai lalu proses yang terakhir yaitu di proses pelaporan keuangan di akuntansi, proses pelaporan keuangan di akuntansi ini tugas dan fungsinya yang paling dominan yaitu melakukan rekonsiliasi jadi pada saat tahun berjalan itu melakukan rekonsiliasi mulai dari pendapatan kemudian belanja sama pembiayaan kita lakukan proses rekonsiliasi ini bulanan mulai dari bulan januari sampai dengan desember, setelah nanti tutup tahun kemudian kita lakukan proses pelaporan keuangan yaitu laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah itu memuat 7 laporan mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, kita susun laporan keuangan daerah ini setelah itu kita serahkan


	<p>ke BPK untuk dilakukan audit pemeriksaan BPK ini ada 2 yaitu pemeriksaan audit intern dan audit rinci lalu pada saat kita menyerahkan laporan ke BPK itu Namanya laporan keuangan daerah unaudited setelah itu BPK turun untuk memeriksa semua transaksi yang ada di Kabupaten Probolinggo semua OPD plus kecamatan dan kelurahan, juga dana desa semuanya di priksa kurang lebih dalam waktu 35 hari diperiksa. Setelah proses pemeriksaan nantinya akan keluar opini BPK ada 4 yaitu opini tertinggi itu wajar tanpa pengecualian, kedua wajar dengan pengecualian, ketiga tidak memberikan pendapat, keempat disclamer dan Kabupaten Probolinggo bisa mempertahankan opini tertinggi sebanyak 9 kali berturut-turut. Walaupun telah mendapatkan 9 kali opini tertinggi bukan berarti kami berpuas diri malah tantangan kedepannya semakin berat karena semakin kita mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saringan pemeriksaan semakin ketat semakin rinci semakin detail jadi kita yang berada di BPPKAD beserta para pimpinan dan jajaran mulai dari pimpinan tertinggi sampai kebawah kerja keras supaya pengelolaan keuangan daerah yang ada di kabupaten probolinggo bisa tertip administrasi, transparan dan akuntabel.</p>
6	<p>Apakah ada kendala dipengelolaan keuangan daerah dalam merancang APBD ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kendala itu banyak yang harus dipahami, yang pertama bahwa kemampuan SDM dimasing-masing OPD itu tidak sama, kemampuannya tidak sama yang pertama dikarenakan latar belakang Pendidikan yang tidak sama ada yang dari Sarjana Sosial ada yang dari Sarjana Pertanian, ada yang dari Sarjana Peternakan kemudian ada yang dari Sarjana Ekonomi, ada yang dari Sarjana Teknik dari latar belakang Pendidikan yang tidak sama itu menyebabkan pemahaman yang ada dimasing-masing OPD tidak sama tapi kami tidak berkecil hati bahwa sanya bagaimana cara kita untuk memahami persepsi</p>

	<p>yang sama salah satunya di BPPKAD itu dilakukan kegiatan bimbingan teknis kaitannya dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) semua OPD ada bimbingan teknis, ada bimbingan yang berkaitan dengan penyusunan RKA, kemudian ada bimbingan teknis kaitannya dengan pemahaman penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) itu kita lakukan semacam bimbingan teknis karena apa? Biar nanti pada saat penyusunan RKA itu biar satu jadi hasil output dan outcome nya itu sama jadi tidak berbeda itu yang pertama kaitannya dengan kemampuan keterbatasan SDM. Yang kedua kekurangan SDM, dimasing-masing OPD itu kadang kala walaupun ada istilah Kasubag Perencanaan tapi ada yang kurang ada yang tidak ada pegawainya jadi ya pegawai ini yang menyebabkan kendala. Yang ketiga kaitannya dengan sering bergantian personil seperti mutase, baru sebentar sudah diganti itulah yang menyebabkan kondisi yang ada di Kabupaten Probolinggo itu agak sedikit mengalami kendala tetapi untuk saat ini kami sudah ada proses regenerasi supaya kemudian adanya perpindahan tersebut tidak asal jadi kalau ada satu pegawai kurang lebih 5 tahun maksimal itu bisa berjalan dengan cepat.</p>
7	<p>Terkait Pengelolaan keuangan daerah , Bagaimana partisipasi masyarakat? Jawaban :</p> <p>Terkait partisipasi masyarakat dalam laporan keuangan daerah, partisipasi masyarakat ada istilahnya itu musyawarah perencanaan pembangunan yang lini sektor itu ada di BAPEDA, jadi meliputi BAPEDA dilibatkan semua. Semua elemen masyarakt, jadi usulah-usulan itu tidak hanya ditatanan Kabupaten tapi sudah meliputi tatanan didesa mulai dari RT/RW, Kelurahan, Desa kemudian masuk ke Kecamatan semua itu ditampung kaitannya dengan pokok pikiran apa saja yang menjadi titik perhatian yang ada di lapangan mulai dari tingkat RT/RW semua di akomodir melalui kecamatan kemudian disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, kedua di</p>


	<p>godok kemudian permasalahan-permasalahan itu nanti akan di distribusikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing sendiri OPD misalnya kaitannya dengan dana desa, dana desa ini titik sektornya di dinas pemberdayaan masyarakat desa kemudian kaitannya dengan bagian pemerintahan itu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan, desa semua itu sudah bersinergi.</p>
8	<p>Apakah masyarakat terlibat aktif dalam mengetahui pengelolaan keuangan daerah ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kalau terlibat aktif pada saat penyusunan laporan keuangan daerah tidak, tapi semua itu berawal dari bawah misalnya kegiatan-kegiatan dari dana desa, dana desa itu lini sektor kan di dinas pemberdayaan masyarakat desa jadi kegiatan-kegiatan yang program pemerintah pusat lalu ditransfer ke pemerintah daerah kemudian itu sudah tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa karena di desa itu ada istilahnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa (APBD Desa) dan dari masing-masing desa itu kebutuhannya apa misalnya kaitannya dengan pelebaran jalan kemudian pemasangan paving kemudian pendirian posyandu, pembangunan puskesmas, pembangunan gapura itu semua difasilitasi melalui dana desa. Dari dana desa itu kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa diakomodir oleh APBD Desa kemudian itu sudah masuk program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Probolinggo.</p>
9	<p>Menurut bapak, apakah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dimana harus menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas ?</p> <p>Jawaban :</p>

	<p>Terkait dengan peran dari pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Probolinggo kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak dipungkiri kita masih banyak kekurangan dan banyak kelemahan, harapannya kedepannya kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melibatkan secara aktif peran dari masyarakat karena kita sebagai ASN yaitu pelayan yang melayani masyarakat bukan berarti karena pejabat lalu seenaknya sendiri tidak, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu harus kita penuhi makadari itu aspirasi khususnya yang dari bawah itu harus kita akomodir supaya Kabupaten Probolinggo itu bisa lebih baik dengan Kabupaten yang ada di sekitarnya.</p>
10	<p>Apakah masyarakat dapat ijin dalam mengakes mengenai pengelolaan keuangan daerah , yaitu realisasi atau laporan pertanggungjawaban , seperti website atau link yang lamgsung dari pemerintah daerah ?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kaitannya dengan informasi laporan keuangan daerah itu sudah dikoordinir lini sektornya yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), di Dinas KOMINFO itu informasi apa saja mereka minta kepada kami khususnya di BPPKAD mereka minta apa saja kaitannya dengan laporan keuangan daerah kita beri softcopy nya kemudian mereka menyebarkannya di dalam website DISKOMINFO dan kita sudah melakukan juga ini tidak hanya terjadi di tahun ini tetapi sudah di tahun-tahun sebelumnya informasi seperti itu, ada website nya dan ada linknya.</p>

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp (031) 5925289, 081216781170 E-mail: feb@untag-sby.ac.id

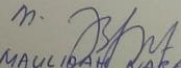
SEMESTER
 Gasal / Genap
 2021 / 2022

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa / NBI : MUHAMMAD NUFAL DHERMAN, 12200012
 Nama Pembimbing : MAULIDAH NARASTRI, SE, MA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KINERJA KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI VALUE FOR MONEY DAN
 PENDEKATAN KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. PROBOLINGGO
 TAHUN 2017 - 2021)
 Mulai Program Skripsi : Semester Thn. Ak. Selesai Bimbingan Tanggal

No.	HARI / TANGGAL	KONSENTRASI		PARAF
		BAB / HAL	KETERANGAN REVISI	
1	16-9-2021	SAK.4	Konsultasi judul : Revisi	Jst
2	11-10-2021	Judul	Konsultasi Judul : Acc. Siapkan Bab 1	Jst
3	15-11-2021	Bab 1	Bab 1 : Revisi, Siapkan Bab II (Draft)	Jst
4	04-02-2022	Bab 1-ii	Bab 1, ii: ACC. Siapkan Bab iii (Draft)	Jst
5	17-03-2022	Bab 1-iii	Bab iii (Revisi), Siapkan draft wawancara	Jst
6	25-4-2022	Bab 1-iii	Bab 1-iii: ACC. draft wawancara: ACC	Jst
7	30-4-2022	Bab 1-iii	Revisi pasca proposal	Jst
8	15-05-2022	Bab 4	Revisi draft 4	Jst
9	22-05-2022	Bab 4	Revisi Bab 4.	Jst
10	30-05-2022	Bab 4-5	ACC. Bab 4, Revisi Bab 5	Jst
11	07-06-22	Bab 5	Revisi Bab 5. Siapkan Lampiran	Jst
12	15-06-22	Bab 5	ACC Bab 5, Revisi Lampiran.	Jst
13	12-07-22	Naskah	ACC	Jst.

Perpanjangan I _____
 Semester _____
 Th. Ak. _____
 Paraf Kajur _____

Surabaya, 16 SEPTEMBER 2022
 M. 
 MAULIDAH NARASTRI, SE, MA
 (Nama dan tanda tangan Pembimbing)

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpun (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO



SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/096/426.204/2022

Surat dari : **UNTAG SURABAYA** Tertanggal 06 Juni 2022 Nomor : 1747/K/FEB/VI/2022 Perihal : *Perhomonan Ijin Untuk Mengadakan Penelitian*

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : Muhammad Naufal Dhermawan
NIM/NIP. : 1221800081
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat : Jl. Wr Supratman No.09 Desa Bulu Kraksaan
Thema/Acara Survey/Resarch : IMPLEMENTASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DITINJAU DARI KONSEP VALUE FOR MONEY DAN PENDEKATAN KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017-2021)
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Lamanya Survey / Research : 09 Juni 2022 s/d 09 Juli 2022
Pengikut peserta Survey / Research : 0 Orang

Dengan *ketentuan sebagai berikut*

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Menaatii ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey /Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 09 Juni 2022

**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO**



UGAS IRWANTO, S. Sos. M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009

TEMBUSAN :

1. Yth. PIt. Bupati Probolinggo (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Probolinggo
3. Sdr. Kapolres Kab. Probolinggo
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.Probolinggo
5. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UNTAG) Surabaya
6. Yang Bersangkutan

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017 (Audited)
1	PENDAPATAN - LRA	2.147.336.906.798,00	2.109.237.164.702,70
2	PENDAPATAN ASILI DAERAH (PAD) - LRA	311.749.555.522,00	302.046.061.275,70
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	46.729.000.000,00	57.804.901.705,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	26.094.472.325,00	24.676.895.550,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	5.491.010.522,00	5.560.291.652,56
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	233.435.072.675,00	214.003.972.367,64
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.780.990.664.776,00	1.749.072.088.377,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.409.812.254.894,00	1.345.461.046.956,00
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	86.904.376.683,00	71.830.993.615,00
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	53.979.795.461,00	16.642.210.761,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	961.711.263.000,00	961.711.263.000,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	307.216.819.750,00	295.276.579.580,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	278.986.142.000,00	278.986.142.000,00
14	Dana Penyesuaian - LRA	278.986.142.000,00	278.986.142.000,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	92.192.267.882,00	124.624.899.421,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	92.192.267.882,00	124.624.899.421,00
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	54.596.686.500,00	58.119.015.050,00
18	Pendapatan Hibah - LRA	9.771.000.000,00	11.652.622.550,00

19	Pendapatan Lainnya - LRA	44.825.686.500,00	46.466.992.500,00
20	BELANJA	1.908.535.291.175,13	1.703.003.320.819,00
21	BELANJA OPERASI	1.549.633.095.082,21	1.374.261.062.015,15
22	Belanja Pegawai	821.593.091.889,69	747.749.294.096,00
23	Belanja Barang dan Jasa	617.470.796.192,52	556.045.720.219,15
24	Belanja Hibah	106.135.991.000,00	66.836.188.700,00
25	Belanja Bantuan Sosial	3.564.000.000,00	2.893.300.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	869.216.000,00	736.559.000,00
27	BELANJA MODAL	349.902.196.092,92	326.769.685.303,85
28	Belanja Modal Tanah	465.100.000,00	300.235.500,00
29	Belanja Modal Perakatan dan Mesin	80.314.045.369,92	67.128.194.287,00
30	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	66.762.449.840,00	64.450.582.707,00
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.425.377.200,00	179.057.938.006,00
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.935.223.683,00	15.832.734.803,85
33	BELANJA TAK TERDUGA	9.000.000.000,00	1.972.573.500,00
34	Belanja Tak Terduga	9.000.000.000,00	1.972.573.500,00
35	TRANSFER	391.701.477.000,00	390.890.976.999,85
36	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	391.701.477.000,00	390.890.976.999,85
37	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.672.900.000,00	4.672.900.000,00
38	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.633.261.000,00	2.633.261.000,00
39	Transfer Bantuan Keuangan Desa	384.395.316.000,00	383.584.815.999,85
40	SURPLUS / (DEFISIT)	(152.899.861.377,13)	15.342.866.883,86
41	PEMBIAYAAN		
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.106.869.294,98	184.965.771.468,48

43	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	141.951.799.294,98	141.951.799.294,98
44	Pencatatan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
45	Penerimaan Kembali Piutang	3.155.070.000,00	3.013.972.173,50
46	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
47	PENGELARAN PEMBIAYAAN	32.207.007.917,85	22.951.000.000,00
48	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
49	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.707.007.917,85	6.200.000.000,00
50	Pembayaran Pokok Utang	-	-
51	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	1.751.000.000,00
52	PEMBIAYAAN NETTO	152.899.861.377,13	162.014.771.468,48
53	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	177.357.638.352,34

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN - LRA	741.548.144,631,40	767.982.582,610,40
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	23.199.535,121,40	23.885.627.103,40
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	16.000.000,000,00	16.643.930,982,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	1.570.000,000,00	1.608.277,000,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.629.535,121,40	5.633.419,121,40
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	377.126.131,510,00	402.949.477,520,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	38.639.971,890,00	64.455.306,533,00
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	1.277.374,890,00	1.148.844,000,00
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	707.156,953,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	37.332.232,000,00	62.568.101,586,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	30.365.000,00	31.203.994,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	135.281,620,00	143.293,000,00
14	Dana Penyesuaian - LRA	135.281,620,00	143.293,000,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	338.350,878,000,00	338.350,877,987,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	338.350,878,000,00	338.350,877,987,00
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	341.222,478,000,00	341.147,477,987,00
18	Pendapatan Hibah - LRA	19.121,600,000,00	19.046,600,000,00
19	Pendapatan Lainnya - LRA	322.100,878,000,00	322.100,877,987,00

20	BELANJA	16.586.678.125,00	15.982.923.555,00
21	BELANJA OPERASI	12.396.513.125,00	12.246.265.375,00
22	Belanja Pegawai	168.200.000,00	169.800.000,00
23	Belanja Barang dan Jasa	50.333.125,00	28.279.375,00
24	Belanja Hibah	9.001.961.000,00	8.872.167.000,00
25	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	300.000.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	2.876.019.000,00	2.876.019.000,00
27	BELANJA MODAL	3.704.575.000,00	3.266.170.120,00
28	Belanja Modal Tanah	2.495.000.000,00	2.102.900.000,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.275.000,00	398.093.000,00
30	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	49.400.000,00	22.375.500,00
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	227.375.000,00	225.943.000,00
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	534.525.000,00	516.858.620,00
33	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-
34	BELANJA TAK TERDUGA	485.590.000,00	470.488.060,00
35	Belanja Tak Terduga	485.590.000,00	470.488.060,00
36	TRANSFER	473.519.696.894,86	471.905.615.300,00
37	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	16.776.734.394,86	15.562.652.800,00
38	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.767.815.394,86	8.553.733.800,00
39	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.008.919.000,00	7.008.919.000,00
40	Transfer Bantuan Keuangan	456.742.962.500,00	456.342.962.500,00
41	Transfer Bantuan Keuangan Desa	456.742.962.500,00	456.342.962.500,00
42	SURPLUS / (DEFISIT)	251.441.769.611,54	280.094.043.755,40
43	PEMBIAYAAN		

44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.850.525.000,00	192.624.694.481,74
45	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	(174.492.640.352,34)	12.967.500.375,23
46	Pencarian Dana Cadangan	-	-
47	Penerimaan Kembali Pinjaman Putang	180.343.165.352,34	179.657.194.106,51
48	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
49	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.836.052.000,00	7.095.080.754,17
50	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
51	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.985.527.000,00	2.299.555.754,17
52	Pembayaran Pokok Uang		
53	Pembayaran Pinjaman Daerah	5.850.525.000,00	4.795.525.000,00
54	PEMBIAYAAN NETTO	(2.985.527.000,00)	185.529.613.727,57
55	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	248.456.242.611,54	465.623.657.482,97

Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (Audited)
1	PENDAPATAN - LRA	2.409.989.818.413,00	2.405.134.988.058,74
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	246.036.795.800,00	245.431.703.862,63
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	60.120.000.000,00	65.409.953.754,32
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	32.911.217.500,00	35.384.854.982,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	5.575.958.000,00	5.838.375.616,94
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	147.429.620.300,00	138.798.519.509,37
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.077.463.422.613,00	2.059.435.195.814,00
8	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA	1.511.713.779.613,00	1.474.871.521.892,00
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	83.310.038.000,00	75.313.338.142,00
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	83.532.351.000,00	61.149.642.539,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.010.656.046.000,00	1.010.715.706.000,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	334.215.344.613,00	327.692.835.211,00
13	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	422.390.367.000,00	422.390.366.987,00
14	Dana Penyesuaian - LRA	422.390.367.000,00	422.390.366.987,00

15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LRA	143.359.276.000,00	162.173.306.935,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	124.624.897.000,00	143.438.927.935,00
17	Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi	18.734.379.000,00	18.734.379.000,00
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	86.489.600.000,00	100.268.088.382,11
19	Pendapatan Hibah - LRA	86.489.600.000,00	100.253.304.000,00
20	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	14.784.382,11
21	BELANJA	2.037.616.618.291,83	1.858.960.054.504,60
22	BELANJA OPERASI	1.638.472.293.095,08	1.498.859.916.889,63
23	Belanja Pegawai	957.851.796.688,80	904.401.962.389,93
24	Belanja Barang dan Jasa	610.060.554.906,28	528.056.067.464,70
25	Belanja Hibah	62.195.150.000,00	58.570.415.535,00
26	Belanja Bantuan Sosial	7.452.500.000,00	6.919.180.000,00
27	Belanja Bantuan Keuangan	912.291.500,00	912.291.500,00
28	BELANJA MODAL	394.998.312.341,75	357.931.010.622,97
29	Belanja Modal Tanah	7.157.500.000,00	6.607.932.000,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.947.264.875,78	83.852.211.697,00
31	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	130.250.547.550,00	119.064.914.471,74
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	137.074.306.590,00	129.444.810.326,23
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.397.434.625,97	15.935.744.128,00
34	Belanja Modal Aset Lainnya	3.171.258.700,00	3.025.398.000,00
35	BELANJA TAK TERDUGA	4.146.012.855,00	2.169.126.992,00

36	Belanja Tak Terduga	4.146.012.855,00		2.169.126.992,00
37	TRANSFER	554.012.328.650,00		553.912.328.650,00
38	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	8.090.015.000,00		8.090.015.000,00
39	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.286.500.000,00		5.286.500.000,00
40	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.803.515.000,00		2.803.515.000,00
41	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	545.922.313.650,00		545.822.313.650,00
42	Transfer Bantuan Keuangan Desa	545.922.313.650,00		545.822.313.650,00
43	SURPLUS / (DEFISIT)	(181.639.128.528,83)		(7.737.395.095,86)
44	PEMBIAYAAN			
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	188.683.128.528,83		189.427.731.408,30
46	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	187.620.628.528,83		187.618.442.974,83
47	Pencairan Dana Cadangan	0,00		0,00
48	Penerimaan Kembali Putang	1.062.500.000,00		1.809.288.433,47
49	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00
50	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.044.000.000,00		6.252.500.000,00
51	Pembentukan Dana Cadangan	0,00		0,00
52	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.544.000.000,00		4.544.000.000,00
53	Pembayaran Pokok Utang	0,00		0,00
54	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00		1.708.500.000,00

55	PEMBIAYAAN NETTO	181.639.128.528,83	183.175.231.408,30
56	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEWAJIBAN	0,00	175.437.836.312,44

Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (Audited)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.343.395.502.546,00	2.399.817.125.466,09
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.561.274.555,00	300.398.775.730,94
3	Paik Daerah	61.675.000.000,00	65.802.737.598,00
4	Retribusi Daerah	17.683.845.395,00	15.617.128.777,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.164.538.103,00	6.199.646.527,90
6	Lain-lain PAD yang Sah	192.037.891.057,00	212.779.262.828,04
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.965.669.287.991,00	2.003.576.092.440,14
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.837.784.013.336,00	1.844.520.109.039,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.885.274.655,00	159.055.983.401,14
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.164.940.000,00	95.842.257.295,01
11	Pendapatan Hibah	14.200.000.000,00	10.555.544.675,00
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	85.964.940.000,00	85.286.712.620,01
13	BELANJA DAERAH	2.513.229.514.503,00	2.234.945.553.137,78
14	BELANJA OPERASI	1.664.417.679.289,00	1.451.288.134.136,72
15	Belanja Pegawai	1.664.417.679.289,00	845.322.572.963,44
16	Belanja Barang dan Jasa	636.603.756.013,00	499.424.157.999,68
17	Belanja Bunga	402.645.362,00	330.558.473,60
18	Belanja Hibah	89.952.144.763,00	75.529.859.700,00
19	Belanja Bantuan Sosial	31.828.059.300,00	30.680.985.000,00
20	BELANJA MODAL	223.140.368.268,00	175.518.233.417,06
21	Belanja Modal Tanah	10.700.000.000,00	9.253.460.000,00

22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.636.090.667,00	51.892.445.233,00
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.460.908.459,00	50.536.266.700,66
24	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.206.925.950,00	56.558.772.090,61
25	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.031.422.157,00	7.277.289.392,79
26	Belanja Modal Aset Lainnya	105.021.035,00	0
27	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.503.820.946,00	27.821.539.655,00
28	Belanja Tidak Terduga	42.503.820.946,00	27.821.539.655,00
29	BELANJA TRANSFER	583.167.646.000,00	580.317.645.929,00
30	Belanja Bagi Hasil	7.836.144.000,00	7.836.144.000,00
31	Belanja Bantuan Keuangan	575.331.502.000,00	572.481.501.929,00
32	SURPLUS / DEFISIT	-169.834.011.957,00	164.871.572.328,31
33	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	201.217.081.957,00	201.435.326.558,93
34	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	196.297.081.957,00	196.295.725.957,70
35	Pencairan Dana Cadangan	0	0
36	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	3.455.006.307,00
37	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	920.000.000,00	1.684.594.294,23
38	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.383.070.000,00	28.691.533.931,00
39	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
40	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	1.656.976.500,00
41	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.383.070.000,00	12.034.557.431,00
42	PEMBIAYAAN NETTO	169.834.011.957,00	172.743.792.627,93
43	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	337.615.364.956,24

Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020 (Audited)
1	PENDAPATAN - LRA	2.336.621.884.218,30	2.331.513.790.016,76
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	251.853.285.137,80	254.884.191.561,70
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	61.199.000.000,00	63.800.464.846,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	14.928.518.855,00	13.692.582.875,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.119.639.082,80	6.119.639.082,80
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	169.606.127.200,00	171.271.504.757,90
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.962.616.439.080,50	1.952.569.330.698,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.371.086.529.782,00	1.375.815.571.772,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	458.003.164.000,00	458.003.164.000,00
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	122.186.116.298,50	107.559.965.926,00
11	Bantuan Keuangan - LRA	11.340.629.000,00	11.190.629.000,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	122.152.160.000,00	124.060.267.757,06
13	Pendapatan Hibah - LRA	122.152.160.000,00	124.059.471.949,00
14	Pendapatan Lainnya - LRA	0	795.808,06
15	BELANJA	1.909.163.498.030,74	1.707.922.238.038,71
16	BELANJA OPERASI	1.481.232.642.548,87	1.371.802.532.772,96
17	Belanja Pegawai	964.763.422.364,00	910.170.878.666,91
18	Belanja Barang dan Jasa	455.233.738.704,87	405.582.241.215,05
19	Belanja Bunga	111.189.380,00	103.154.191,00
20	Belanja Hibah	56.371.792.100,00	52.102.958.700,00
21	Belanja Bantuan Sosial	4.752.500.000,00	3.843.300.000,00

22	BELANJA MODAL	270.154.185.932,03	254.602.152.790,75
23	Belanja Modal Tanah	3.634.972.000,00	3.140.357.500,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.741.825.695,47	96.261.738.005,75
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.897.076.484,00	55.635.201.167,00
26	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.085.127.060,00	81.889.684.577,00
27	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.501.684.692,56	15.405.105.691,00
28	Belanja Modal Aset Lainnya	2.293.500.000,00	2.270.065.850,00
29	BELANJA TAK TERDUGA	157.776.669.549,84	81.517.552.475,00
30	Belanja Tak Terduga	157.776.669.549,84	81.517.552.475,00
31	TRANSFER	594.336.292.500,00	594.321.288.460,00
32	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	9.174.710.000,00	9.159.710.000,00
33	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.912.000.000,00	5.912.000.000,00
34	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.262.710.000,00	3.247.710.000,00
35	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	585.161.582.500,00	585.161.578.460,00
36	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	584.235.301.000,00	584.235.296.960,00
37	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	926.281.500,00	926.281.500,00
38	SURPLUS / DEFISIT	-166.877.906.312,44	29.270.263.518,05
39	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.820.906.312,44	185.064.818.439,65
40	Penggunaan Sil/PA	175.437.836.312,44	175.409.613.961,65
41	Pinjaman Dalam Negeri	9.383.070.000,00	8.579.551.124,00
42	Penerimaan Kembali Pinang	1.000.000.000,00	1.075.653.354,00
43	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.943.000.000,00	18.038.000.000,00
44	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
45	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.943.000.000,00	2.038.000.000,00

46	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
47	PEMBIAYAAN NETTO	166.877.906.312,44	167.026.818.439,65
48	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	196.297.081.957,70

Lampiran 9 Hasil Jurnal Turnirin

IMPLEMENTASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DITINJAU DARI KONSEP VALUE FOR MONEY DAN PENDEKATAN
KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN PROBOLINGO TAHUN 2017 – 2021)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	fani_yr.staff.gunadarma.ac.id Internet Source	4%
2	prosiding.stie-aas.ac.id Internet Source	4%
3	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	4%
4	Submitted to CSU, San Diego State University Student Paper	3%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 70 words